



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2025

DOKUMEN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

**PALANGKA RAYA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur capaian kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatdari karunia Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Manual IKU adalah dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2025. Diharapkan dengan disusunnya Manual IKU ini dapat dijadikan acuan ataupun arahan bagi pegawai di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan aktivitas pengukuran dan pengisian kinerja yang targetnya telah disusun dan ditetapkan di dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Perjanjian Kinerja (PK) serta dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Manual IKU di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kedepannya apabila ada perubahan perencanaan kinerja akan disusun kedalam dokumen perubahan tahun berikutnya.

Palangka Raya, Januari 2025



PIH. KEPALA DINAS,

NITA FERA, S.Pi., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197202191999032008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	4
Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	4
1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6
2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.....	9
3. Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor).....	12
4. Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan.....	13
5. Angka Konsumsi Ikan (AKI)	14
6 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	17
7 Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	21
8 Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Pesisir.....	24
9 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku.....	25
10 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Berperan dalam Kegiatan Pengawasan SKPD.....	28
11 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	30
12 Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID.....	34
BAB II INDIKATOR KINERJA BIDANG	37
2.1. Tujuan dan Sasaran Bidang Sekretariat.....	37
1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	37
1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37
1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.....	39
1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.....	39
1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah.....	40
1.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40
1.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41
1.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42	42
1.1.9 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 42	42
1.1.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.....	43
1.1.11 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	43
1.1.12 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	44

1.1.13 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.....	45
1.1.14 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	45
1.1.15 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.....	46
a. Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	47
b. Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai	47
1.1.16 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.....	48
1.1.17 Pengelolaan pembudidayaan Ikan di Laut	48
1.1.18 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	49
a. Layanan UPT. Perikanan Budidaya Air Payau.....	50
1.1.19 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil .	50
1.1.20 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	51
1.1.21 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	52
1.1.22 Peningkatan Pelayanan BLUD.....	52
BAB III PENUTUP.....	54

BAB I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2025 merupakan langkah krusial dalam menerjemahkan visi strategis daerah ke dalam ukuran keberhasilan yang konkret dan terukur. Proses teknis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kendali organisasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya perairan di Bumi Tambun Bungai—baik perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan hasil laut. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global, perubahan iklim, serta kebijakan Blue Economy, target-target yang disusun dalam periode enam tahun ke depan ini dirancang secara teknokratis dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*). Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap program kerja berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, serta pemenuhan gizi masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
1	Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	152.405,21
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	145.481,98
		Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)	76.390
2	Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.	Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	35.697,36
		Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	61,23
3	Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,50
		Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	112,00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
1	Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	6
2	Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	90
		Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SKPD (kelompok)	58
1.	Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B
		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat	Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID	37

Sumber :Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2025

1. Nama Organisasi :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

2. Tugas :

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal

perikanan untuk kapal diatas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT), Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT), Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT);
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.
4. Indikator Kinerja Utama
- a. Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan dan Berkualitas.
 - b. Sasaran Tujuan : Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Deskripsi
1. Pengertian dan Konsep Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Perikanan Budidaya (Aquaculture) adalah kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta biota air lainnya (udang, kerang, rumput laut) dalam wadah terkontrol.

Intervensi: Berbeda dengan perikanan tangkap, konsep budidaya melibatkan intervensi manusia seperti penebaran benih (*stocking*), pemberian pakan (*feeding*), dan perlindungan dari predator.

Cakupan Media: Meliputi budidaya air tawar (kolam, keramba), air payau (tambak), dan laut (keramba jaring apung, longline).

2. Peran Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebagai Indikator Utama dalam Sektor Perikanan

Sebagai IKU, produksi budidaya memiliki peran strategis sebagai:

Penyangga Stok Alam: Mengurangi tekanan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan di laut.

Motor Ekonomi Pedesaan: Menciptakan lapangan kerja di wilayah daratan dan pesisir melalui unit-unit pembenihan dan pembesaran.

Komoditas Ekspor Utama: Beberapa komoditas seperti udang vaname dan rumput laut merupakan penyumbang devisa terbesar dari sektor kelautan dan perikanan.

3. Perhitungan dan Interpretasi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan total volume produksi yang dipanen oleh pembudidaya ikan pada periode tertentu.

Interpretasi:

Peningkatan Produksi: Menandakan adanya keberhasilan dalam ekstensifikasi (perluasan lahan) atau intensifikasi (penerapan teknologi tinggi).

Variasi Komoditas: Jika produksi didominasi oleh satu komoditas saja, maka ketahanan sektor tersebut rentan terhadap fluktuasi harga komoditas spesifik tersebut.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya sangat bergantung pada input dan lingkungan:

Ketersediaan Input: Kualitas dan kuantitas benih unggul serta kestabilan harga pakan (yang seringkali menjadi komponen biaya terbesar, 60-70%).

Teknologi: Penerapan sistem budidaya modern seperti *Recirculating Aquaculture System* (RAS), Bioflok, atau penggunaan automatic feeder.

Lingkungan dan Penyakit: Kualitas air, perubahan iklim, serta serangan wabah penyakit (seperti virus pada udang) yang dapat menyebabkan gagal panen massal.

Tata Ruang: Kepastian hukum mengenai zonasi wilayah budidaya agar tidak berbenturan dengan sektor pariwisata atau industri.

5. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dalam Evaluasi Kinerja Sektor Perikanan

Evaluasi produksi budidaya dilakukan dengan memantau beberapa parameter kinerja teknis:

Survival Rate (SR): Tingkat kelangsungan hidup biota dari mulai tebar hingga panen.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Feed Conversion Ratio (FCR): Efisiensi penggunaan pakan; semakin rendah angka FCR, semakin efisien kinerja produksinya.

Kesesuaian Target: Membandingkan realisasi tonase produksi dengan target tahunan yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra).

6. Upaya Mencapai Indikator

- **Penyediaan Benih dan Induk Unggul :** Meningkatkan produktivitas melalui distribusi benih bersertifikat dan pembangunan pusat pembenihan lokal (Hatchery). Penggunaan benih berkualitas tinggi yang tahan penyakit (seperti varietas SPF/SPR) sangat krusial untuk mempercepat masa panen serta meningkatkan tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) komoditas budidaya.
- **Penerapan Teknologi Intensifikasi :** Mendorong adopsi teknologi modern seperti sistem *Biofloc*, *Recirculating Aquaculture System (RAS)*, dan *Smart Farming*. Digitalisasi pemberian pakan serta pemantauan kualitas air secara *real-time* memungkinkan peningkatan padat tebar ikan di lahan yang terbatas tanpa merusak stabilitas lingkungan perairan.
- **Kemandirian dan Efisiensi Pakan :** Mengurangi biaya operasional dengan mendorong produksi pakan mandiri berbasis bahan baku lokal guna menekan ketergantungan pada pakan pabrikan yang mahal. Optimalisasi manajemen pemberian pakan (penurunan nilai *Feed Conversion Ratio*) memastikan pertumbuhan ikan lebih maksimal dengan biaya yang lebih efisien bagi pembudidaya.
- **Manajemen Kesehatan dan Lingkungan :** Memperkuat sistem biosekuriti dan pemantauan kesehatan ikan secara berkala untuk mencegah wabah penyakit yang dapat menyebabkan gagal panen massal. Selain itu, penataan drainase dan pengelolaan limbah budidaya harus dilakukan agar ekosistem perairan tetap sehat dan produktif untuk siklus budidaya berkelanjutan.
- **Revitalisasi Lahan dan Pengembangan Kawasan :** Mengaktifkan kembali tambak-tambak yang tidak produktif (*idle*) serta memetakan zona potensial baru untuk budidaya air tawar, payau, maupun laut. Pengembangan budidaya berbasis kawasan (klasterisasi) mempermudah koordinasi teknis, penyaluran bantuan, dan pemantauan total output produksi secara terintegrasi.

Sumber Data

Jenis Data yang Digunakan :

Data Volume Produksi (Output Fisik) : Data ini mencakup total berat (tonase) ikan, udang, atau tanaman air yang dipanen dalam satu periode tertentu.

Data Luas Lahan dan Sarana Budidaya : Data mengenai kapasitas fasilitas produksi yang digunakan sebagai media budidaya. Data ini sangat penting untuk menghitung tingkat produktivitas per unit area.

Data Input Produksi (Benih dan Pakan) : Data mengenai jumlah sarana produksi yang dimasukkan ke dalam sistem budidaya selama siklus berjalan.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
<p>Bagaimana Data Diperoleh :</p> <p>Data Lapangan (Primer): Diperoleh petugas enumerator melalui survei sampling langsung ke lokasi budidaya. Petugas melakukan wawancara dengan pembudidaya mengenai hasil panen terakhir, jumlah pakan yang dihabiskan, serta luas kolam yang terisi ikan.</p> <p>Data Laporan (Sekunder): Diperoleh dari rekapitulasi laporan rutin Dinas Perikanan tingkat kabupaten/kota, data sertifikasi (seperti sertifikat CBIB), serta laporan distribusi benih dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembenihan.</p>
Cara Menghitung
<p>Rumus Dasar Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) sebagai berikut :</p> $\text{Produksi Perikanan Budidaya (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i$ <p>Keterangan :</p> <p><i>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</i> yaitu Total volume hasil panen perikanan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha budidaya perikanan dalam periode tertentu.</p> <p>Q_i yaitu Volume produksi komoditas perikanan budidaya jenis ke-i yang dipanen (misalnya ikan, udang, rumput laut, dan komoditas budidaya lainnya).</p> <p>n yaitu Jumlah jenis komoditas perikanan budidaya.</p>
Unit Bertanggung Jawab
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab
Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Deskripsi
<p>1. Pengertian dan Konsep Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</p> <p>Produksi Perikanan Tangkap adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan dan biota air lainnya di perairan alami (baik laut maupun perairan darat seperti sungai, danau, dan waduk).</p> <p>Konsep Volume: Pengukuran dilakukan berdasarkan berat (ton) atau nilai (rupiah) ikan yang didaratkan (<i>landings</i>).</p> <p>Cakupan: Meliputi seluruh komoditas hasil tangkapan, termasuk ikan bersisip, udang-udangan, moluska, dan biota lainnya yang memiliki nilai ekonomi.</p> <p>2. Peran Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebagai Indikator Utama dalam Sektor Perikanan</p> <p>Dalam dokumen perencanaan strategis (seperti Renstra KKP), jumlah produksi berperan sebagai:</p> <p>Parameter Ketahanan Pangan: Mengukur ketersediaan pasokan protein hewani asal laut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.</p>

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Indikator Pemanfaatan Sumber Daya: Menunjukkan sejauh mana potensi lestari yang ada telah dimanfaatkan.

Basis Pertumbuhan Ekonomi: Menjadi input utama bagi sektor hilir (industri pengolahan) dan ekspor produk perikanan.

3. Perhitungan dan Interpretasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan total volume pendaratan ikan di seluruh titik pendaratan (Pelabuhan Perikanan, TPI, atau pesisir).

Interpretasi:

Produksi Naik: Dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan modernisasi alat tangkap atau perluasan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*).

Produksi Stagnan/Turun: Bisa menjadi indikasi adanya gejala *overfishing* (tangkap lebih) atau penurunan jumlah armada dan upaya penangkapan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Beberapa variabel kunci yang mempengaruhi jumlah produksi meliputi:

Upaya Penangkapan (*Fishing Effort*): Jumlah kapal, ukuran mesin (GT), jenis alat penangkap ikan (API), dan jumlah hari melaut.

Kondisi Oseanografi: Arus laut, suhu permukaan laut, dan fenomena iklim seperti El Niño atau La Niña yang mempengaruhi migrasi ikan.

Teknologi: Penggunaan alat bantu seperti *fish finder* (sonar) dan GPS.

Kebijakan: Pengaturan kuota penangkapan, zonasi (jalur penangkapan), dan ketersediaan bahan bakar bersubsidi.

5. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dalam Evaluasi Kinerja Sektor Perikanan

Evaluasi produksi perikanan tangkap dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap **Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB)** atau *Total Allowable Catch (TAC)*.

Evaluasi CPUE (*Catch per Unit Effort*): Performa tidak hanya dilihat dari total tonase, tapi juga dari rata-rata hasil tangkapan per kapal. Penurunan CPUE meskipun total produksi naik menandakan penurunan efisiensi dan potensi kelangkaan stok.

Analisis Musiman: Mengevaluasi apakah target bulanan tercapai sesuai dengan musim ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

6. Upaya Mencapai Indikator

- **Modernisasi Armada dan Alat Tangkap :** Meningkatkan kapasitas unit penangkapan melalui bantuan kapal motor dengan GT yang lebih besar dan alat tangkap yang lebih produktif namun ramah lingkungan. Langkah ini bertujuan agar nelayan mampu menjangkau area penangkapan (*fishing ground*) yang lebih jauh dan potensial guna meningkatkan volume tangkapan per trip.
- **Optimalisasi Fasilitas Pelabuhan Perikanan :** Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan, seperti perbaikan dermaga dan percepatan proses bongkar muat,

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

untuk menarik lebih banyak kapal mendaratkan hasil tangkapannya. Pelabuhan yang efisien akan memastikan seluruh hasil laut tercatat secara resmi dan mengurangi pembuangan ikan yang tidak layak jual (*post-harvest losses*).

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi Penangkapan** : Mendorong penggunaan sistem informasi prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDPI) berbasis satelit untuk membantu nelayan menemukan lokasi konsentrasi ikan secara akurat. Penggunaan teknologi navigasi dan *fish finder* ini efektif untuk menghemat penggunaan BBM sekaligus meningkatkan kepastian hasil tangkapan setiap kali melaut.
- **Pengelolaan Wilayah Penangkapan Terukur** : Menerapkan sistem Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zonasi untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan kelestarian stok ikan. Pengaturan yang baik di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) memastikan produksi tetap tinggi dan stabil dalam jangka panjang tanpa merusak ekosistem laut.
- **Dukungan Logistik dan Operasional Nelayan** : Mempermudah akses nelayan terhadap kebutuhan operasional dasar, terutama ketersediaan BBM bersubsidi di lokasi pendaratan dan penyediaan es untuk pengawetan di atas kapal. Dukungan logistik yang terjamin memungkinkan nelayan untuk melaut secara rutin tanpa terkendala biaya tinggi atau penurunan kualitas ikan saat tiba di darat.

Sumber Data

Jenis Data yang Digunakan :

Data Volume Produksi (Output Fisik) : Data ini mencakup jumlah berat (tonase) ikan yang berhasil didaratkan oleh nelayan dalam periode tertentu.

Data Upaya Penangkapan (Fishing Effort) : ata pendukung yang menggambarkan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan ikan. Produksi tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada alat dan armada yang digunakan.

Data Nilai Produksi (Nilai Nominal) : Data mengenai harga jual ikan di titik pertama kali didaratkan (harga produsen).

Bagaimana Data Diperoleh :

Data Lapangan (Primer): Diperoleh melalui **Survei Sampling Pendaratan Ikan** oleh petugas di lapangan (enumerator) dan pengisian **Logbook Penangkapan Ikan** oleh nahkoda kapal di atas 5 GT. Untuk nelayan kecil, data diperoleh melalui wawancara sampling mengenai hasil tangkapan per trip.

Data Laporan (Sekunder): Diperoleh dari catatan harian **Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**, laporan bulanan dari Pelabuhan Perikanan, serta data administrasi kartu **KUSUKA** (Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan) untuk memvalidasi jumlah nelayan yang aktif.

Cara Menghitung

Rumus Dasar Produksi Perikanan Tangkap (Ton) sebagai berikut :

$$\text{Produksi Perikanan Tangkap (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i$$

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
<p>Keterangan :</p> <p><i>Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</i> yaitu Total jumlah hasil tangkapan ikan yang dihasilkan dari kegiatan perikanan tangkap dalam periode tertentu.</p> <p>Q_i yaitu Volume produksi ikan hasil tangkapan jenis ke-i yang didaratkan dan/atau dilaporkan (dalam satuan berat).</p> <p>n yaitu Jumlah jenis ikan atau kelompok komoditas hasil tangkapan.</p>
Unit Bertanggung Jawab
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab
Bidang Perikanan Tangkap

3. Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)
Deskripsi
<p>1. Pengertian</p> <p>Jumlah Kebutuhan Benih adalah total volume benih ikan atau udang dalam satuan ekor yang diperlukan untuk mengisi wadah budidaya (kolam, karamba, keramba jaring apung, atau tambak) sesuai dengan target produksi yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu.</p> <p>Indikator ini mencerminkan sejauh mana kesiapan input produksi dalam mendukung keberhasilan usaha pembudidayaan ikan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>2. Konsep Indikator</p> <p>Konsep indikator ini didasarkan pada rantai pasok produksi perikanan budidaya, dengan poin-poin utama sebagai berikut:</p> <p>Kapasitas Tampung (Stocking Density): Perhitungan kebutuhan didasarkan pada luas lahan budidaya yang aktif di 14 Kabupaten/Kota di Kalteng dikalikan dengan padat tebar ideal per meter persegi atau meter kubik.</p> <p>Target Produksi Daerah: Angka kebutuhan benih berbanding lurus dengan target produksi ikan konsumsi (seperti Ikan Patin, Nila, Gabus/Haruan, dan Betok/Papuyu) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi.</p> <p>Siklus Budidaya: Perhitungan mempertimbangkan frekuensi penebaran dalam satu tahun anggaran (misal: 2-3 siklus per tahun tergantung komoditas).</p> <p>Mitigasi Mortalitas: Perhitungan konsep ini juga memasukkan asumsi tingkat kematian (Mortality Rate) tertentu, sehingga jumlah benih yang disediakan harus lebih besar dari target populasi ikan saat panen.</p> <p>3. Rumus Penghitungan (Metode Pengukuran)</p> <p>Untuk menentukan angka kebutuhan benih secara akurat, digunakan rumus:</p>

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

$$KB = \frac{TP}{(BW \times SR)}$$

Keterangan:

KB: Kebutuhan Benih (Ekor)

TP: Target Produksi Ikan Konsumsi (Kg)

BW: Body Weight / Berat rata-rata ikan saat panen (Kg/Ekor)

SR: Survival Rate / Tingkat kelangsungan hidup (Persentase, misal 0.8 untuk 80%)

4. Sumber Data

Data diperoleh melalui:

Laporan bulanan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Data identifikasi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) penerima bantuan.

Pendataan rutin statistik perikanan budidaya (SatuData KKP).

5. Manfaat Indikator

Perencanaan Produksi: Sebagai dasar bagi UPT Balai Benih Ikan (BBI) milik Provinsi untuk memproduksi benih secara mandiri.

Pengambilan Kebijakan: Menentukan besaran bantuan hibah benih kepada masyarakat agar tepat jumlah dan tepat sasaran.

Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Kalteng melalui keberlanjutan usaha budidaya.

4. Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan

Unit Penanggung Jawab: Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Target Sasaran: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Perikanan

1. Pengertian

Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan adalah total bobot/berat (dalam satuan Ton atau Kilogram) dari hasil perikanan yang telah mengalami proses pengolahan, baik secara tradisional maupun modern, yang diproduksi oleh unit pengolah ikan (UPI) atau Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu periode tahun anggaran. Indikator ini mengukur keberhasilan hilirisasi sektor perikanan, di mana bahan baku ikan mentah diubah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan masa simpan yang lebih lama.

2. Konsep Indikator

Konsep ini mencakup seluruh transformasi komoditas perikanan (tangkap maupun budidaya) khas Kalimantan Tengah menjadi produk jadi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Pengolahan Tradisional: Mencakup produk khas lokal Kalteng seperti ikan asin, ikan asap (salai), ikan kering, fermentasi (wadi), dan pembuatan kerupuk/kemplang.

Pengolahan Modern/Lanjutan: Mencakup produk bernilai tambah tinggi seperti abon ikan, bakso ikan, nugget, fillet ikan, serta produk kemasan kaleng atau vakum.

Unit Penanggung Jawab: Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Basis Bahan Baku: Mengutamakan komoditas unggulan daerah seperti Ikan Patin, Nila, Jelawat, serta ikan tangkapan perairan darat/sungai.

Standar Mutu: Produk yang dihitung adalah produk yang memenuhi standar kelayakan pengolahan (minimal memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan/SKP atau izin P-IRT).

3. Metode Penghitungan

Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh volume produksi dari setiap unit usaha pengolahan di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaporkan ke Provinsi.

Rumus:

$$V_{total} = \sum (V_{tradisional} + V_{modern})$$

Keterangan:

- V_{total} : Total Volume Produk Olahan (Ton/Tahun).
- $V_{tradisional}$: Volume produk olahan metode tradisional.
- V_{modern} : Volume produk olahan metode modern/hilirisasi lanjut.

4. Sumber Data

Laporan Tahunan Bidang P2HP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Aplikasi SatuData Kelautan dan Perikanan (KKP).

Survei/Pendataan Langsung pada Poklansar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) dan UMKM binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

5. Manfaat Indikator

Pengukuran Hilirisasi: Mengetahui sejauh mana produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kalteng berhasil diolah menjadi produk turunan.

Peningkatan Ekonomi: Menjadi basis evaluasi peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan pembudidaya melalui nilai tambah (value added).

Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan beragam produk protein ikan yang praktis dikonsumsi oleh masyarakat luas di Kalimantan Tengah.

5. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Konsumsi Ikan Masyarakat

Deskripsi

1. Pengertian dan Konsep Konsumsi Ikan

Konsumsi Ikan adalah rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi oleh penduduk dalam kurun waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun).

Konsep Konsumsi: Mencakup seluruh jenis biota perairan (ikan, udang, cumi, kerang, dll.) baik dalam bentuk segar maupun olahan.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Standar Setara Utuh Segar: Agar data seragam, semua produk olahan (seperti ikan asin, bakso ikan, atau ikan kaleng) dihitung kembali ke berat aslinya saat masih utuh dan segar menggunakan faktor konversi tertentu.

2. Peran Konsumsi Ikan Masyarakat sebagai Indikator Utama dalam Sektor Perikanan

Sebagai IKU, Konsumsi Ikan Masyarakat memiliki peran strategis untuk:

Indikator Keberhasilan Program Hilirisasi: Menunjukkan sejauh mana kampanye makan ikan (seperti GEMARIKAN) berhasil mengubah pola konsumsi masyarakat.

Parameter Ketahanan Pangan dan Gizi: Mengukur peran protein ikan dalam mengatasi isu kesehatan nasional seperti *stunting* dan kecerdasan bangsa.

Penggerak Pasar Domestik: Semakin tinggi KIM, semakin besar daya serap pasar dalam negeri terhadap hasil produksi nelayan dan pembudidaya, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor.

3. Perhitungan dan Interpretasi Konsumsi Ikan Masyarakat

Data KIM umumnya bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS.

Interpretasi:

Angka Meningkat: Menandakan kenaikan aksesibilitas, daya beli, atau kesadaran gizi masyarakat terhadap produk perikanan.

Variasi Wilayah: Wilayah pesisir cenderung memiliki KIM lebih tinggi dibanding wilayah pegunungan. Perbedaan ini digunakan untuk menentukan arah distribusi dan logistik ikan nasional.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Ikan Masyarakat

Konsumsi ikan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai variabel multidimensi:

Aksesibilitas dan Distribusi: Ketersediaan stok ikan di pasar lokal dan keberadaan infrastruktur rantai dingin (*cold chain*).

Harga Relatif: Harga ikan dibandingkan dengan sumber protein lain seperti ayam atau daging sapi.

Budaya dan Preferensi: Kebiasaan makan masyarakat setempat dan persepsi terhadap rasa atau bau ikan.

Daya Beli (Pendapatan): Seiring meningkatnya pendapatan rumah tangga, kecenderungan untuk mengonsumsi protein berkualitas seperti ikan biasanya juga meningkat.

5. Konsumsi Ikan Masyarakat dalam Evaluasi Kinerja Sektor Perikanan

Evaluasi KIM dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis:

Analisis Kesenjangan (Gap Analysis): Membandingkan realisasi KIM dengan target nasional atau target kecukupan gizi yang direkomendasikan ahli kesehatan.

Evaluasi Rantai Pasok: Mengidentifikasi di mana terjadi hambatan yang menyebabkan harga ikan mahal di tingkat konsumen akhir.

Efektivitas Kampanye: Menilai sejauh mana kegiatan promosi makan ikan di daerah-daerah dengan tingkat konsumsi rendah memberikan dampak peningkatan angka.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

6. Upaya Pencapaian Indikator

- **Program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan):** Sosialisasi masif melalui kampanye, lomba masak ikan, dan edukasi ke sekolah-sekolah untuk membangun budaya makan ikan sejak dini.
- **Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG):** Mengintegrasikan menu berbahan dasar ikan dalam program nasional makan siang gratis untuk meningkatkan asupan protein anak-anak sekolah di Kalteng.
- **Intervensi Pencegahan Stunting:** Menjadikan konsumsi ikan sebagai solusi utama penanganan stunting karena kandungan Omega-3 dan protein tinggi yang optimal untuk pertumbuhan otak dan fisik anak.
- **Hilirisasi dan Diversifikasi Produk:** Mendorong pengolahan ikan menjadi produk turunan (seperti bakso, abon, atau kerupuk ikan) agar lebih menarik bagi konsumen yang kurang menyukai ikan segar.
- **Safari Gemarikan:** Distribusi paket bantuan ikan segar dan olahan ikan kepada masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi.
- **Penyediaan Ikan Murah:** Menjaga stabilitas pasokan ikan lokal (seperti ikan Nila, Patin, dan ikan tangkapan sungai) di pasar tradisional agar harganya tetap terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah.

Sumber Data

Jenis Data yang digunakan :

Berdasarkan standar KKP, KIM dihitung dari tiga komponen utama konsumsi:

Konsumsi Dalam Rumah Tangga (KRT): Data jumlah ikan yang dibeli dan dikonsumsi oleh anggota rumah tangga di dalam rumah.

Konsumsi Luar Rumah Tangga (KLRT): Data konsumsi ikan di tempat-tempat makan seperti restoran, warung, catering, atau hotel.

Konsumsi Tidak Tercatat (KTT): Data konsumsi ikan yang berasal dari hasil tangkapan sendiri, pemberian/hadiah, atau konsumsi ikan di institusi (asrama, lapas, dll.) yang tidak tercover penuh dalam survei rutin.

Bagaimana Data diperoleh :

Data primer untuk menghitung Angka Konsumsi Ikan diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan secara rutin oleh BPS dengan mewawancarai langsung rumah tangga sampel mengenai volume dan jenis ikan yang dikonsumsi selama periode tertentu.

Data sekunder diperoleh melalui analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) serta laporan statistik produksi dan distribusi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memvalidasi total ketersediaan ikan di pasar domestik. Integrasi kedua jenis data ini sangat penting bagi pemerintah untuk memantau tingkat asupan protein masyarakat secara akurat serta menentukan efektivitas program kampanye makan ikan dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan bangsa.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
Cara menghitung
Rumus Dasar Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) sebagai berikut : $KIM (Kg/Kap/Tahun) = \frac{\sum_{i=1}^n KIDRT \times WEIND}{JP}$
Keterangan : <i>Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM)</i> yaitu Konsumsi Ikan perKapita di Rumah tangga (setara utuh segar). <i>WEIND</i> yaitu Individu Penimbang. <i>Jumlah Penduduk (JP)</i> yaitu Jumlah Penduduk.
Unit Bertanggung Jawab
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab
Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran

6 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB -Pertumbuhan PDRB Perikanan
1. Deskripsi
<p>Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha mengukur laju peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Analisis ini menggunakan harga konstan untuk melihat pertumbuhan riil, yang mencakup sektor utama seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.</p> <p>Mengenai pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Produksi: PDRB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan jasa-jasa. • Indikator Ekonomi: Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan sektor mana yang memacu pertumbuhan ekonomi regional dan mana yang mengalami perlambatan. • Kinerja Sektor: Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian seringkali menjadi kontributor utama, namun pertumbuhan dapat bervariasi karena fluktuasi ekonomi. • Peran PDRB ADHK: PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi).
2. Peran Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB sebagai Indikator Utama dalam Sektor Perikanan
Sektor perikanan berperan vital dalam pertumbuhan PDRB melalui lapangan usaha primer (perikanan tangkap/budidaya) dan sekunder (industri pengolahan), dengan memberikan kontribusi positif,

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekspor, terutama di daerah pesisir. Meskipun kontribusinya fluktuatif di beberapa wilayah, sektor ini tetap menjadi penggerak ekonomi utama. Faktor utamanya meliputi penggunaan teknologi/alat tangkap, jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP), modal, serta pengelolaan lingkungan.

Fluktuasi pertumbuhan PDRB sektor perikanan dipengaruhi oleh faktor lingkungan (cuaca, musim), teknis-operasional (alat tangkap, teknologi), biologis (tingkat *overfishing*), dan sosial-ekonomi. Perubahan cuaca ekstrem dan penggunaan teknologi tradisional sering memicu penurunan produktivitas, sementara kebijakan pengelolaan, investasi, serta permintaan pasar menjadi penggerak utama pertumbuhan positif.

Sebagai IKU, kontribusi perikanan terhadap PDRB berfungsi sebagai parameter keberhasilan pembangunan ekonomi kelautan di suatu daerah. Perannya meliputi:

Alat Ukur Dampak Ekonomi: Menunjukkan apakah program pemerintah (seperti pemberian bantuan alat tangkap atau benih) benar-benar memberikan dampak nilai tambah ekonomi secara makro.

Penentu Prioritas Pembangunan: Membantu pengambil kebijakan mengidentifikasi apakah perikanan merupakan **Sektor Unggulan (Base Sector)** yang layak mendapatkan alokasi anggaran lebih besar.

Penyelarasan Target: Menghubungkan target teknis dinas (produksi) dengan target kepala daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD).

3. Parameter Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada lapangan usaha sektor perikanan

parameter utama yang secara langsung mempengaruhi nilai dan pertumbuhan PDRB sektor perikanan:

1. Parameter Produksi (Output)

Ini adalah parameter paling dominan karena PDRB mengukur total nilai produksi dikurangi biaya antara.

- **Volume Produksi Perikanan Tangkap:** Jumlah tonase ikan yang didaratkan. Target produksi perikanan nasional untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai **25,84 juta ton**.
- **Volume Produksi Perikanan Budidaya:** Output dari subsektor tambak, kolam, dan keramba laut.
- **Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lestari:** Kapasitas maksimal penangkapan yang diperbolehkan (potensi lestari Indonesia mencapai sekitar 12 juta ton) untuk menjaga keberlanjutan produksi.

2. Parameter Harga dan Nilai Tambah

- **Indeks Harga Produsen:** Harga di tingkat nelayan/pembudidaya yang menentukan nilai nominal PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku).
- **Struktur Biaya Antara:** Efisiensi penggunaan input seperti BBM, pakan, dan benih. Semakin kecil biaya antara dibandingkan nilai output, semakin besar nilai tambah (PDRB) yang dihasilkan.
- **Hilirisasi Industri:** Keberadaan unit pengolahan ikan (UPI) di daerah yang mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

3. Parameter Investasi dan Infrastruktur

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

- **Realisasi Investasi (PMA/PMDN):** Penanaman modal pada teknologi penangkapan, armada kapal modern, dan infrastruktur pendingin (*cold storage*).
- **Kualitas Infrastruktur Maritim:** Ketersediaan pelabuhan perikanan yang memadai untuk menekan biaya logistik dan menjaga kualitas hasil tangkapan.

4. Parameter Pasar dan Permintaan

- **Nilai Ekspor Perikanan:** Permintaan pasar global terhadap komoditas unggulan seperti udang dan tuna. Kinerja ekspor yang positif secara langsung mendongkrak PDRB sektor ini.
- **Angka Konsumsi Ikan (AKI):** Permintaan domestik yang stabil melalui program seperti **Gemarikan** memastikan terserapnya hasil produksi lokal.

5. Parameter Eksternal dan Kebijakan

- **Kondisi Lingkungan (Iklim):** Fenomena alam yang mempengaruhi pola migrasi ikan dan keberhasilan panen budidaya.
- **Regulasi Pengelolaan Wilayah:** Kebijakan seperti Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang mengatur kuota tangkap guna menjamin ketersediaan stok ikan di masa depan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sangat dinamis dan dipengaruhi oleh:

Faktor Internal: Jumlah armada perikanan, teknologi budidaya, kualitas benih, dan ketersediaan sarana prasarana (pelabuhan/TPI).

Faktor Eksternal: Kondisi cuaca (anomali iklim), harga pasar internasional, dan biaya input (seperti harga BBM nelayan atau pakan ikan).

Investasi: Masuknya industri pengolahan ikan di suatu wilayah akan meningkatkan nilai tambah yang tercatat dalam PDRB.

5. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB dalam Evaluasi Kinerja Sektor

Perikanan

Evaluasi dilakukan untuk melihat konsistensi antara perencanaan dan realisasi. Kerangkanya mencakup:

Monitoring Realisasi: Membandingkan angka rilis BPS setiap tahun dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Analisis Deviasi: Jika target tidak tercapai, dilakukan evaluasi apakah kendalanya berada pada produksi (hulu) atau pada penurunan harga/daya beli (hilir).

Benchmarking: Membandingkan kontribusi perikanan antar wilayah yang memiliki karakteristik geografis serupa untuk melihat daya saing daerah.

6. Upaya Pencapaian Indikator

- **Modernisasi Produksi (Hulu) :** Meningkatkan volume produksi melalui pembaharuan armada tangkap dan penerapan teknologi budidaya intensif (seperti Biofloc). Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkelanjutan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

- **Hilirisasi dan Nilai Tambah** : Mendorong transformasi dari penjualan bahan mentah menjadi produk olahan melalui pembangunan industri pengolahan lokal dan sertifikasi mutu (HACCP). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan harga jual produk dan memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat ekspor.
- **Penguatan Logistik Rantai Dingin** : Membangun infrastruktur cold storage dan sistem distribusi yang efisien untuk meminimalisir kerusakan hasil panen (losses). Rantai dingin yang kuat menjamin kualitas produk tetap prima, sehingga nilai ekonomi komoditas tetap tinggi saat mencapai konsumen.
- **Pemberdayaan SDM dan Permodalan** : Mengonsolidasi nelayan dan pembudidaya ke dalam bentuk koperasi atau korporasi untuk mempermudah akses modal (KUR) dan teknologi. Peningkatan kapasitas manajerial ini penting agar pelaku usaha mampu meningkatkan skala bisnis dari tradisional ke profesional.
- **Akurasi Data dan Iklim Investasi** : Mengoptimalkan pendataan hasil tangkapan secara digital agar seluruh aktivitas ekonomi perikanan tercatat secara formal dalam PDRB. Selain itu, pemerintah perlu memberikan kemudahan izin dan insentif bagi investor untuk membangun pabrik pengolahan di daerah.

Sumber Data

Jenis Data yang Digunakan :

Data Output (Produksi dan Harga) : Pengertian: Data Output adalah total nilai moneter (uang) dari seluruh hasil produksi yang dihasilkan oleh sektor perikanan sebelum dikurangi biaya apa pun. Ini mencerminkan "omzet kotor" dari seluruh aktivitas perikanan di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Data Biaya Antara (Intermediate Consumption) : Biaya Antara adalah nilai barang dan jasa yang habis digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi untuk menghasilkan output di atas. Data ini sangat krusial agar tidak terjadi "penghitungan ganda" dalam ekonomi.

Nilai Tambah Bruto (NTB) : Nilai Tambah Bruto adalah selisih antara **Output (poin 1)** dengan **Biaya Antara (poin 2)**. NTB inilah yang sebenarnya diakui sebagai kontribusi ekonomi riil dari sektor perikanan dalam penghitungan PDRB..

Bagaimana Data Diperoleh :

Data lapangan (primer) diperoleh langsung dari nelayan dan pembudidaya melalui survei atau wawancara guna menangkap harga riil serta biaya produksi terkini secara detail.

Data laporan (sekunder) diambil dari catatan resmi instansi seperti BPS dan Dinas Perikanan yang mencakup statistik produksi tahunan serta administrasi pelabuhan. Kombinasi kedua data ini sangat penting untuk memastikan penghitungan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tetap akurat, valid, dan representatif.

Cara Menghitung

Rumus Dasar Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase) sebagai berikut :

$$Kontribusi_{Sektor A} = \frac{PDRB_{ADHB_{Sektor A}}}{PDRB_{ADHB_{Total}}} \times 100\%$$

Keterangan :

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

$Kontribusi_{Sektor A}$ (%) yaitu Persentase sumbangan nilai tambah Sektor A (dalam hal ini dapat diisi sektor perikanan) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah pada periode tertentu.

$PDRB_{ADHB_{Sektor A}}$ yaitu Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) yang dihasilkan oleh Sektor A (misalnya sektor perikanan), yang mencerminkan nilai tambah bruto sektor tersebut pada tahun berjalan.

$PDRB_{ADHB_{Total}}$ yaitu Total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) dari seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah pada periode yang sama.

Unit Bertanggung Jawab

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Penanggung Jawab

Bidang Kelautan dan Pesisir

7 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Deskripsi

1. Pengertian dan Konsep NTN

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar oleh nelayan (I_b).

Indeks Harga yang Diterima (I_t): Fluktuasi harga hasil tangkapan nelayan di pasar.

Indeks Harga yang Dibayar (I_b): Pengeluaran nelayan yang terdiri dari dua komponen besar, yaitu:

- a. **Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal:** BBM, es, jaring, upah buruh, dan perbaikan kapal.
- b. **Konsumsi Rumah Tangga:** Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan.

2. Peran NTN sebagai Indikator Kinerja Tujuan

NTN merupakan indikator *outcome* (dampak) yang sangat krusial karena:

Ukur Tingkat Kesejahteraan: Menjadi indikator proksi untuk melihat apakah pendapatan nelayan mampu menutupi biaya hidup dan modal kerja.

Evaluasi Kebijakan Harga: Membantu pemerintah melihat apakah kenaikan harga ikan di tingkat konsumen juga dinikmati oleh nelayan di tingkat produsen.

Basis Intervensi Sosial: Jika NTN di suatu wilayah berada di bawah standar, pemerintah dapat mengintervensi melalui subsidi input (BBM) atau perlindungan harga.

3. Perhitungan dan Interpretasi NTN

Data NTN dikumpulkan secara rutin oleh BPS melalui survei harga perdesaan

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Interpretasi:

NTN > 100: Nelayan mengalami **surplus**. Harga hasil tangkapan naik lebih cepat daripada kenaikan biaya produksi dan konsumsi. Daya beli meningkat.

NTN = 100: Nelayan mengalami **titik impas (break-even)**. Peningkatan pendapatan sama dengan peningkatan pengeluaran.

NTN < 100: Nelayan mengalami **defisit**. Daya beli menurun karena biaya hidup dan modal lebih mahal dibanding hasil penjualan ikan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi NTN

Daya beli nelayan sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh :

Harga BBM: Merupakan komponen biaya produksi terbesar (mencapai 60-70%).

Musim dan Cuaca: Mempengaruhi kelimpahan ikan (penawaran) yang berimplikasi pada harga jual.

Inflasi Perdesaan: Kenaikan harga barang pokok di pasar lokal tempat nelayan tinggal.

Rantai Distribusi: Panjangnya mata rantai perdagangan (tengkulak) yang seringkali menekan harga di tingkat nelayan.

5. NTN dalam Kerangka Evaluasi Kinerja Sektor Perikanan

Dalam kerangka evaluasi, NTN digunakan untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan:

Analisis Komparatif: Membandingkan NTN antar wilayah untuk mendeteksi kesenjangan ekonomi antar pesisir.

Korelasi dengan Produksi: Evaluasi dilakukan jika produksi naik namun NTN turun; hal ini menandakan adanya inefisiensi pasar atau jatuhnya harga akibat panen raya (oversupply).

Monitoring Dampak Kebijakan: Digunakan untuk mengevaluasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap daya tahan ekonomi masyarakat pesisir.

6. Upaya Pencapaian Indikator

Untuk memastikan target NTN tercapai, Dislutkan Kalteng melaksanakan program strategis yang berdampak langsung pada pendapatan dan efisiensi biaya nelayan:

- Pengembangan Infrastruktur: Rehabilitasi dan pembangunan pelabuhan perikanan untuk memfasilitasi distribusi hasil tangkap.
- Pengurangan Biaya Produksi: Penyediaan pakan ikan murah melalui pengadaan mesin pakan skala mini bagi kelompok pembudidaya.
- Peningkatan Nilai Tambah: Diversifikasi produk olahan perikanan agar nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan ikan segar.
- Modernisasi Armada: Peningkatan sarana penangkapan ikan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan di wilayah pesisir Kalteng yang kaya sumber daya.

Sumber Data

Jenis Data yang Digunakan:

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Indeks Harga yang Diterima (It) : Data ini mencakup harga rata-rata di tingkat produsen (nelayan) dari berbagai komoditas hasil tangkapan laut maupun perairan darat.

Indeks Harga yang Dibayar (Ib) : Data ini mencakup seluruh pengeluaran nelayan yang dibagi menjadi dua sub-kategori yaitu Konsumsi Rumah Tangga dan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)

Data Tahun Dasar : Data harga pada tahun referensi tertentu yang digunakan sebagai pembanding

Bagaimana Data Diperoleh:

Data primer untuk penghitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN) diperoleh melalui survei lapangan rutin oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan wawancara langsung kepada nelayan dan pedagang di pasar perdesaan pesisir. Melalui metode ini, petugas mencatat secara *real-time* harga jual berbagai komoditas ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta memantau fluktuasi biaya operasional melaut, seperti harga solar, es, dan upah buruh nelayan.

Data sekunder diperoleh dari catatan administratif dan laporan resmi instansi terkait, seperti data statistik produksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta database kartu KUSUKA untuk memvalidasi jumlah pelaku usaha. Kombinasi kedua jenis data ini sangat krusial agar pemerintah dapat memantau daya beli nelayan secara akurat sekaligus mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Cara Menghitung

Rumus Dasar dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai berikut :

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} * 100$$

Modified Laspeyres :

$$I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} * 100$$

Keterangan :

I= indeks baik It maupun Ib

P_{ni} = harga bulan ke n untuk jenis barang ke-i

$P_{(n-1)i}$ = harga bulan ke (n-1) untuk jenis barang ke-i

$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$ = relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke-i

P_{oi} = harga tahun dasar untuk jenis barang ke-i

Q_{oi} = kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

m =banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Unis Bertanggung Jawab

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggung Jawab

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

8 Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Pesisir

Unit Penanggung Jawab: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Target Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir yang sesuai dengan peruntukan

1. Pengertian

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan **Rencana Tata Ruang (RTR)** dan/atau **Rencana Zonasi (RZ)** yang berlaku. Indikator ini mengukur jumlah titik atau lokasi di wilayah perairan Kalimantan Tengah (hingga 12 mil laut) yang telah mendapatkan legalitas pemanfaatan ruang, baik untuk kegiatan berusaha maupun non-berusaha, guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan kerusakan ekosistem.

2. Konsep Indikator

Konsep indikator ini didasarkan pada prinsip **Ekonomi Biru** dan tata kelola ruang yang berkelanjutan di pesisir Kalimantan Tengah:

- **Legalitas dan Kepatuhan:** Setiap aktivitas di laut (seperti pembangunan dermaga, keramba jaring apung skala besar, atau infrastruktur pantai) wajib memiliki dokumen persetujuan KKPRL sebagai izin dasar.
- **Zonasi Wilayah (RZWP3K):** Penentuan lokasi mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang **Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)** Provinsi Kalteng.
- **Keseimbangan Ekologi & Ekonomi:** Menjamin bahwa pemanfaatan ruang untuk peningkatan ekonomi daerah tetap menjaga kelestarian biota laut dan ekosistem perairan.
- **Sinergi Kewenangan:** Koordinasi antara Pemerintah Provinsi (DKP Kalteng) dengan Pemerintah Pusat (KKP) dalam memfasilitasi perizinan dan pengawasan ruang laut.

3. Rumus Penghitungan

Indikator ini dihitung berdasarkan akumulasi lokasi yang telah diterbitkan dokumen kesesuaiannya dalam satu tahun anggaran.

$$N = \sum L_{dijetujui}$$

Keterangan:

- **N:** Total lokasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut (Lokasi).
- **$L_{dijetujui}$:** Jumlah lokasi yang telah mendapatkan Persetujuan KKPRL atau Konfirmasi KKPRL melalui sistem **OSS-RBA** atau evaluasi mandiri daerah.

Unit Penanggung Jawab: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

4. Sumber Data

Data diperoleh melalui:

1. **Dashboard Sistem OSS (Online Single Submission)** untuk perizinan berusaha.
2. Laporan monitoring dan evaluasi **Bidang Kelautan dan Pesisir** DKP Provinsi Kalteng.
3. Dokumen fisik/digital Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan.

5. Manfaat Indikator

- **Kepastian Hukum:** Memberikan jaminan bagi investor dan masyarakat lokal (nelayan/pembudidaya) bahwa lokasi usaha mereka aman secara regulasi.
- **Pengendalian Dampak:** Memudahkan pengawasan terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia di laut.
- **Penyelesaian Konflik:** Meminimalkan sengketa pemanfaatan ruang antar sektor (misal: antara pariwisata, perikanan, dan perhubungan).

9 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Deskripsi

1. Pengertian dan Konsep Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Kepatuhan pelaku usaha KP adalah sejauh mana individu atau badan hukum yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar) menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah.

Konsep ini merujuk pada:

Legalitas Operasional: Kepemilikan izin sah seperti Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI) dan Pengangkutan Ikan (SIPI-PI).

Kepatuhan Teknis: Penggunaan alat penangkap ikan (API) yang ramah lingkungan dan sesuai jalur penangkapan.

Kepatuhan Pelaporan: Kedisiplinan dalam mengisi *e-logbook* penangkapan ikan dan laporan produksi.

2. Peran Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku sebagai Indikator Utama dalam Sektor Perikanan

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Dalam struktur organisasi seperti Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), indikator ini berperan untuk:

Menjamin Keberlanjutan Sumber Daya: Mencegah praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.

Mengukur Efektivitas Pengawasan: Menjadi cermin apakah sosialisasi regulasi dan intensitas patroli pengawasan berhasil mengubah perilaku pelaku usaha.

Mendukung Ekonomi Biru: Memastikan eksploitasi sumber daya laut dilakukan secara tertib hukum untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi.

3. Perhitungan dan Interpretasi Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Data indikator ini umumnya diperoleh dari hasil **inspeksi lapangan** (pemeriksaan kapal di laut atau di pelabuhan) dan **audit kepatuhan** pada unit pengolahan.

Interpretasi:

Persentase Tinggi: Menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang baik atau sistem perizinan yang sudah mudah diakses (user-friendly).

Persentase Rendah: Mengindikasikan adanya hambatan dalam pemenuhan regulasi, kurangnya aparat pengawas, atau ketidaksesuaian antara aturan dengan kondisi riil di lapangan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Tingkat kepatuhan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh:

Kompleksitas Regulasi: Aturan yang terlalu rumit cenderung menurunkan tingkat kepatuhan.

Efektivitas Penegakan Hukum (*Deterrent Effect*): Sejauh mana sanksi memberikan efek jera bagi pelanggar.

Fasilitasi Pemerintah: Kemudahan dalam pengurusan izin (misalnya melalui sistem OSS) dan bantuan teknis bagi nelayan kecil.

Kondisi Ekonomi: Tekanan ekonomi seringkali memaksa pelaku usaha melakukan pelanggaran demi menekan biaya operasional (misalnya menggunakan alat tangkap terlarang namun murah).

5. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku dalam Evaluasi Kinerja Sektor Perikanan

Evaluasi kinerja melalui indikator kepatuhan menggunakan kerangka kerja pengawasan yang terintegrasi:

Pre-emptive: Evaluasi terhadap upaya sosialisasi dan edukasi peraturan.

Preventive: Evaluasi terhadap efektivitas sistem pemantauan (seperti *Vessel Monitoring System/VMS*).

Repressive: Evaluasi terhadap tindak lanjut penanganan pelanggaran (sanksi administrasi atau pidana). Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki kebijakan (*regulatory impact assessment*) pada periode berikutnya.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

6. Upaya Mencapai Indikator

- **Penguatan Pengawasan Terpadu** : Meningkatkan frekuensi patroli rutin dan inspeksi mendadak (*field monitoring*) baik di wilayah penangkapan ikan maupun di unit pengolahan darat. Pengawasan yang intensif memastikan setiap aktivitas operasional terpantau secara langsung guna meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran prosedur teknis di lapangan.
- **Edukasi dan Sosialisasi Regulasi** : Melakukan pembinaan berkelanjutan mengenai aturan tata niaga, standar alat tangkap, dan perlindungan ekosistem kepada para pelaku usaha. Sosialisasi yang masif bertujuan membangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis dan kelestarian sumber daya.
- **Debirokrasi dan Kemudahan Perizinan** : Menyederhanakan proses pengurusan dokumen perizinan melalui sistem digital yang terintegrasi (seperti OSS RBA) agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Dengan memberikan kemudahan legalitas, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk beroperasi secara resmi dan mematuhi seluruh ketentuan administrasi yang berlaku.
- **Implementasi Teknologi Pemantauan Digital** : Mewajibkan penggunaan instrumen teknologi seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk kapal dan sistem ketertelusuran (*traceability*) digital untuk produk olahan. Pemantauan berbasis data *real-time* ini memudahkan otoritas dalam mendeteksi ketidakpatuhan secara dini tanpa harus selalu berada di lokasi fisik.
- **Penegakan Hukum dan Sanksi Berkeadilan** : Menerapkan sanksi administratif dan hukum secara tegas serta konsisten bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Penegakan hukum yang transparan memberikan efek jera sekaligus menciptakan keadilan bagi pelaku usaha lain yang telah berkomitmen mematuhi peraturan perundangan.

Sumber Data

Jenis Data yang Digunakan :

Data Jumlah Pelaku Usaha yang Diperiksa : Data ini merupakan kumpulan informasi mengenai identitas dan jumlah total subjek (pelaku usaha) yang menjadi objek pengawasan atau inspeksi lapangan dalam satu periode tertentu. Data ini berfungsi sebagai angka pembagi (penyebut) untuk mengetahui cakupan pengawasan yang telah dilakukan.

Data Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh : Data ini adalah hasil klasifikasi dari proses pemeriksaan yang menunjukkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi seluruh kriteria legalitas dan teknis sesuai aturan. Data ini berfungsi sebagai angka pembilang dalam rumus persentase kepatuhan.

Instrumen Pemeriksaan (Checklist Data) : Instrumen pemeriksaan adalah alat ukur atau daftar kriteria standar yang digunakan oleh pengawas untuk menilai kepatuhan secara objektif. Ini adalah data pendukung yang menjamin bahwa setiap pelaku usaha dinilai dengan standar yang sama (tidak subjektif).

Bagaimana Data Diperoleh :

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
<p>Data primer untuk menghitung persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan (KP) diperoleh melalui inspeksi lapangan langsung oleh pengawas perikanan melalui mekanisme patroli dan pemeriksaan fisik. Dalam proses ini, petugas melakukan verifikasi secara <i>real-time</i> terhadap kesesuaian alat tangkap, dokumen kapal, serta standar operasional di lokasi usaha yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP).</p> <p>Data sekunder diperoleh dari hasil rekapitulasi database perizinan seperti OSS (Online Single Submission) dan aplikasi SIMWAS (Sistem Informasi Pengawasan) untuk memetakan populasi pelaku usaha yang wajib diawasi serta memvalidasi masa berlaku izin mereka. Sinergi antara temuan langsung di lapangan dan data administratif ini memungkinkan pemerintah untuk menghasilkan rasio kepatuhan yang akurat guna mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan..</p>
Cara Menghitung
<p>Rumus Dasar Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku (%) sebagai berikut :</p> $\text{Persentase Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Diamati}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p><i>Persentase Kepatuhan (%)</i> yaitu Tingkat ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh</i> yaitu Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, atau pemeriksaan dinyatakan memenuhi ketentuan perizinan, standar teknis, kewajiban pelaporan, serta ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Jumlah Pelaku Usaha yang Diamati</i> yaitu Total pelaku usaha kelautan dan perikanan yang menjadi objek pembinaan, pengawasan, atau pemeriksaan pada periode tertentu.</p>
Unit Bertanggung Jawab
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab
Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

10 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Berperan dalam Kegiatan Pengawasan SKPD

Unit Penanggung Jawab: Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
Target Sasaran: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan
<p>1. Pengertian</p> <p>Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah kelompok masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat (nelayan, pembudidaya, atau warga pesisir) untuk</p>

Unit Penanggung Jawab: Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara swakarsa.

Indikator ini mengukur **keaktifan** kelompok masyarakat di berbagai Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yang secara sukarela berperan sebagai "mata dan telinga" dinas untuk memantau, mencatat, dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran (seperti *Illegal Fishing* atau penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan) di wilayah perairan masing-masing.

2. Konsep Indikator

Konsep indikator ini mengacu pada sistem **Pengawasan Berbasis Masyarakat (Sismwasmas)** yang mengedepankan sinergi antara pemerintah dan warga lokal:

- **Pemberdayaan Masyarakat:** Menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek pengawasan, melainkan subjek yang aktif menjaga kelestarian lingkungan perairan Kalteng (sungai, danau, dan laut).
- **Peran Pelaporan (Reporting):** Pokmaswas tidak memiliki wewenang penegakan hukum (menangkap/menahan), melainkan melakukan pemantauan dan melaporkan kejadian kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum.
- **Penyadartahuan:** Pokmaswas berperan memberikan edukasi kepada sesama nelayan mengenai aturan penangkapan ikan yang benar sesuai regulasi daerah.
- **Kriteria "Berperan":** Kelompok dianggap berperan jika memenuhi unsur aktivitas seperti melakukan patroli swakarsa, menyampaikan laporan informatif, atau mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Metode Penghitungan

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kelompok yang sah (memiliki SK Pengukuhan) dan menunjukkan aktivitas nyata dalam periode satu tahun.

Rumus:

$$N = \sum Pokmaswas_{Aktif}$$

Keterangan:

- **N:** Total Pokmaswas yang berperan.
- **Pokmaswas_{Aktif}:** Kelompok yang memiliki administrasi legal dan terbukti melakukan koordinasi/pelaporan pengawasan kepada SKPD (Dinas Provinsi).

4. Sumber Data

Unit Penanggung Jawab: Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

1. **SK Pengukuhan Pokmaswas** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat berwenang.
2. **Laporan Kejadian/Informasi** yang masuk dari kelompok ke Bidang Pengawasan.
3. **Daftar Hadir dan Notulensi** kegiatan pembinaan/sosialisasi pengawasan yang melibatkan kelompok.
4. **Buku Log Patroli Swakarsa** milik masing-masing Pokmaswas.

5. Manfaat Indikator

- **Efisiensi Pengawasan:** Membantu keterbatasan personil Pengawas Perikanan dalam menjangkau luasnya wilayah perairan di Kalimantan Tengah.
- **Deteksi Dini:** Mempercepat penanganan pelanggaran di perairan (seperti penyetruman atau peracunan ikan) melalui laporan cepat dari masyarakat lokal.
- **Keberlanjutan Sumber Daya:** Menjamin ketersediaan stok ikan bagi generasi mendatang dengan meminimalkan praktik perusakan lingkungan perairan.

11 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Deskripsi

1. Pengertian dan Konsep SAKIP

SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan.

Konsep Dasar: SAKIP mengubah paradigma kerja aparatur pemerintah dari "berapa besar anggaran yang dihabiskan" (*input*) menjadi "berapa besar kinerja yang dihasilkan" (*outcome*) dan apa manfaatnya bagi masyarakat.

Komponen Penilaian: Meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

2. Peran SAKIP sebagai Indikator Utama dalam Sektor Perikanan

Dalam instansi kelautan dan perikanan (baik KKP maupun Dinas di daerah), Nilai SAKIP berperan sebagai:

Pengukur Efektivitas Penggunaan Anggaran: Memastikan setiap Rupiah yang dikeluarkan untuk bantuan nelayan, benih, atau patroli laut dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Indikator Reformasi Birokrasi: Menunjukkan sejauh mana instansi perikanan telah bertransformasi menjadi lembaga yang ramping, efisien, dan transparan.

Metameter Kinerja: SAKIP mengukur "kesehatan" organisasi dalam mengelola indikator teknis lainnya (seperti produksi dan PDRB).

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

3. Perhitungan dan Interpretasi SAKIP

Nilai SAKIP diperoleh melalui evaluasi tahunan yang dilakukan oleh **KemenPANRB** (untuk level Kementerian/Pemda) atau **Inspektorat** (untuk level OPD/Eselon II).

Komponen Bobot Penilaian (Secara Umum):

- a. **Perencanaan Kinerja (30%)**: Kualitas Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja.
- b. **Pengukuran Kinerja (25%)**: Ketepatan pemilihan IKU dan mekanisme pengumpulan data.
- c. **Pelaporan Kinerja (15%)**: Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- d. **Evaluasi Internal (10%)**: Peran pengawasan internal dalam memperbaiki kinerja.
- e. **Capaian Kinerja (20%)**: Realisasi fisik dan keberhasilan mencapai target.

Interpretasi Predikat:

AA (90-100): Sangat Memuaskan (Leading edge).

A (80-90): Memuaskan.

BB (70-80): Sangat Baik.

B (60-70): Baik.

CC, C, D: Perlu perbaikan mendasar hingga sangat kurang

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SAKIP

Komitmen Pimpinan (Tone at the Top): Sejauh mana pimpinan terlibat dalam penyusunan strategi dan pemantauan kinerja.

Penyelarasan (Cascading): Kemampuan instansi menurunkan target besar (level Dinas) menjadi target individu (level staf).

Kualitas Data: Ketersediaan data yang valid dan tepat waktu (seperti data statistik perikanan).

Pemanfaatan Aplikasi: Penggunaan sistem informasi manajemen kinerja (e-SAKIP) yang terintegrasi.

5. SAKIP dalam Evaluasi Kinerja Sektor Perikanan

Evaluasi SAKIP di sektor perikanan dilakukan melalui siklus :

Review Triwulanan: Rapat koordinasi untuk melihat hambatan serapan anggaran dan realisasi target produksi/ekspor.

Self-Assessment: Evaluasi mandiri oleh unit kerja sebelum dinilai oleh tim eksternal.

Audit Kinerja: Pemeriksaan oleh Inspektorat untuk memastikan bahwa klaim capaian kinerja didukung oleh bukti yang sah.

6. Upaya Mencapai Indikator

- **Penguatan Kualitas Perencanaan Kinerja** : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan RKT) melalui penyelarasan (*cascading*) indikator kinerja dari level pimpinan hingga staf. Pastikan setiap program dan kegiatan memiliki indikator yang bersifat *SMART* (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) agar tujuan organisasi selaras dengan mandat yang diberikan.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

- **Digitalisasi Pengukuran Kinerja** : Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi kinerja elektronik (*e-Performance*) untuk mencatat capaian secara *real-time* dan periodik. Digitalisasi ini mempermudah pengumpulan data pendukung (*evidence*) yang valid dan akurat, sehingga pemantauan kinerja dapat dilakukan secara objektif tanpa menunggu akhir tahun anggaran.
- **Peningkatan Kualitas Pelaporan (LKJIP)** : Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang tidak hanya menyajikan angka capaian, tetapi juga analisis mendalam mengenai keberhasilan, kegagalan, serta hambatan yang dihadapi. Laporan harus disusun secara komunikatif dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran terhadap hasil yang dicapai.
- **Optimalisasi Evaluasi Internal** : Memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat dalam melakukan pra-evaluasi secara berkala sebelum penilaian dari pihak eksternal (Kemenpan-RB). Setiap rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya harus ditindaklanjuti secara tuntas untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
- **Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja** : Memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama. Dengan prinsip *money follows program*, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat terjaga, sehingga hasil kerja yang dirasakan masyarakat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Sumber Data

Jenis Data yang Digunakan :

Data Perencanaan Kinerja : Data ini mencakup dokumen strategis yang menetapkan target dan arah kebijakan instansi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Data Pengukuran dan Pelaporan Kinerja : Data ini berisi realisasi atau capaian aktual di lapangan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data Evaluasi Internal dan Akuntabilitas Keuangan : Data yang menunjukkan adanya fungsi kontrol dan keselarasan antara penggunaan uang dengan hasil kinerja.

Bagaimana Data Diperoleh :

Data Laporan (Sekunder): Tim penilai (Kemenpan-RB atau Inspektorat) mengunduh dan meninjau dokumen dari aplikasi portal kinerja masing-masing instansi (seperti aplikasi e-Performance).

Data Lapangan/Verifikasi (Primer): Penilai melakukan **wawancara (In-depth Interview)** dengan pimpinan instansi dan melakukan **uji petik** ke lapangan untuk membuktikan apakah data dalam laporan sesuai dengan fakta (misal: memeriksa apakah bantuan alat tangkap benar-benar sampai ke nelayan).

Cara Menghitung

Rumus Dasar Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) sebagai berikut :

$$\text{Nilai SAKIP} = \sum \text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot}$$

Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

No	Komponen SAKIP	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
Total		100%

Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Kementerian PANRB atau tim yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri PANRB untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisor (Pengawas), Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan).

Kategori Nilai SAKIP

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian	
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada instansi pemerintah/unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.	
Unit Bertanggung Jawab	
Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	
Penanggung Jawab	
Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	

12 Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID

Unit Penanggung Jawab: Sekretariat / PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan
Target Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
<p>1. Pengertian</p> <p>Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID adalah total dokumen atau data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalteng yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, yang telah diklasifikasikan dan dipublikasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).</p> <p>Indikator ini mengukur komitmen dinas dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui rencana, program, dan hasil kerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>

2. Konsep Indikator

Konsep indikator ini didasarkan pada **Daftar Informasi Publik (DIP)** yang wajib dikelola oleh PPID Pelaksana DKP Kalteng, yang terbagi menjadi empat kategori utama:

- **Informasi Berkala:** Informasi yang wajib diperbarui secara rutin (seperti Profil Dinas, Laporan Keuangan/LAKIP, Rencana Strategis, dan Statistik Perikanan Kalteng).
- **Informasi Serta-Merta:** Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (seperti pengumuman peringatan cuaca buruk bagi nelayan atau informasi wabah penyakit ikan).
- **Informasi Tersedia Setiap Saat:** Informasi yang harus ada ketika diminta oleh pemohon informasi (seperti Daftar Prosedur Izin Perikanan, Peraturan Daerah terkait Kelautan, dan dokumen kontrak kerja sama).
- **Aksesibilitas Digital:** Penyediaan informasi dilakukan melalui berbagai kanal, terutama situs web resmi dinas, media sosial, dan ruang pelayanan informasi fisik.

3. Metode Penghitungan

Indikator ini dihitung berdasarkan akumulasi jenis informasi yang telah divalidasi dan diunggah/diterbitkan dalam periode satu tahun.

Rumus:

$$N = \sum (IP_{berkala} + IP_{sertamerta} + IP_{setiapsaat})$$

Keterangan:

- **N:** Total jenis informasi publik yang disediakan.
- **IP:** Jenis Informasi Publik yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas selaku Atasan PPID.

4. Sumber Data

1. **Situs Web Resmi DKP Kalteng** (Menu PPID/Layanan Informasi).
2. **Daftar Informasi Publik (DIP)** yang diperbarui setiap tahun.
3. **Laporan Layanan Informasi Publik** (Laporan Tahunan PPID).
4. **Aplikasi E-PPID** Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Manfaat Indikator

- **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Membangun citra positif pemerintah melalui keterbukaan data produksi ikan, bantuan hibah, dan anggaran.
- **Mencegah Maladministrasi:** Mengurangi potensi sengketa informasi dengan menyediakan data yang akurat dan mudah diakses.

Unit Penanggung Jawab: Sekretariat / PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan

- **Mendorong Partisipasi:** Memudahkan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha perikanan dalam mendapatkan data untuk mendukung riset atau investasi di Kalimantan Tengah.

BAB II INDIKATOR KINERJA BIDANG

Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) di tiap bidang merupakan langkah penting untuk mengukur keberhasilan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan serta memastikan program dan kegiatan di tingkat Bidang selaras dengan sasaran strategis Kepala Dinas serta visi-misi Pemerintah Provinsi. Target ini disusun agar setiap bidang, mulai dari perikanan tangkap hingga budidaya, memiliki sasaran yang jelas dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1. Tujuan dan Sasaran Bidang Sekretariat

1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode	Sasaran/Indikator Utama/Uraian
Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Deskripsi
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah rangkaian proses strategis untuk memastikan setiap program kerja memiliki landasan hukum dan target yang jelas, didukung oleh alokasi anggaran yang efisien, serta diakhiri dengan penilaian objektif terhadap hasil kerja. Melalui kegiatan ini, instansi dapat menjamin bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk mencapai sasaran prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan nelayan atau produktivitas budidaya, sekaligus memenuhi standar akuntabilitas dalam penilaian SAKIP.
	Target
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penanggung Jawab
	Sekretaris

1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Deskripsi
	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan instansi yang meliputi perencanaan anggaran, penatausahaan transaksi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban fiskal. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh alokasi dana terserap secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan layanan administrasi yang tertib, instansi dapat meminimalisir risiko temuan audit serta mempertahankan opini laporan keuangan yang baik (seperti WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
	Target
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Penanggung Jawab
	Sekretaris

1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Deskripsi
	Layanan Administrasi Barang Milik Daerah merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan aset yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang secara tertib dan akuntabel. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh kekayaan daerah yang dikelola oleh instansi terdata dengan akurat, terjaga fisiknya, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional dinas. Administrasi aset yang baik sangat krusial dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mencegah terjadinya kerugian negara akibat hilangnya aset daerah.
	Target
	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	Penanggung Jawab
	Sekretaris

1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Deskripsi
	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah rangkaian aktivitas manajemen SDM yang berfokus pada penatausahaan data, fasilitasi jenjang karier, dan pemenuhan hak-hak ASN secara tertib dan transparan. Kegiatan ini memastikan seluruh proses administrasi—mulai dari rekrutmen internal, kenaikan pangkat, hingga masa pensiun—berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan administrasi kepegawaian yang profesional, instansi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan disiplin pegawai, serta menjamin ketersediaan personel yang kompeten untuk menjalankan pelayanan publik.

	Target
	1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Penanggung Jawab
	Sekretaris

1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Deskripsi
	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah rangkaian aktivitas yang mendukung kelancaran operasional internal instansi melalui pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga kantor secara profesional. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, mempercepat alur komunikasi birokrasi, dan menyediakan fasilitas kerja yang memadai bagi seluruh unit organisasi. Dengan layanan umum yang efektif, hambatan teknis dalam pekerjaan sehari-hari dapat diminimalisir, sehingga seluruh pegawai dapat fokus pada pencapaian tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing.
	Target
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penanggung Jawab
	Sekretaris

1.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	Deskripsi
	Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah proses pengadaan aset fisik yang dilakukan secara sistematis untuk menyediakan fasilitas kerja yang representatif, mulai dari peralatan kantor hingga kendaraan operasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki sarana pendukung yang layak dan memadai dalam menjalankan program-program strategis daerah. Pelaksanaan yang transparan melalui sistem pengadaan secara elektronik (LPSE/E-Katalog) menjamin bahwa setiap barang yang dibeli memiliki kualitas terbaik dan memberikan nilai manfaat maksimal bagi kelancaran birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
	Target
	Pengadaan Mebel
	Penanggung Jawab
	Sekretaris

1.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Deskripsi
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan penyediaan layanan esensial yang mencakup pembayaran utilitas (listrik, air, internet), penyediaan tenaga pendukung operasional (keamanan dan kebersihan), serta jasa pemeliharaan sarana kantor. Kegiatan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan aktivitas dinas, di mana ketersediaan jasa yang tepat waktu dan berkualitas akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai. Dengan pengelolaan jasa penunjang yang profesional, instansi dapat menjamin standar pelayanan internal yang tinggi sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat tercapai secara maksimal.
	Target
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Penanggung Jawab
	Sekretaris

1.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Deskripsi
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah rangkaian aktivitas perawatan dan perbaikan aset secara berkala guna menjamin ketersediaan sarana prasarana yang berfungsi optimal setiap saat. Melalui pemeliharaan yang terencana, instansi dapat memperpanjang usia pakai aset, mencegah biaya perbaikan yang lebih besar akibat kerusakan berat, serta menjaga nilai investasi daerah. Keberhasilan kegiatan ini berdampak langsung pada kelancaran layanan birokrasi, karena seluruh fasilitas pendukung—mulai dari gedung hingga kendaraan operasional—berada dalam kondisi prima untuk melayani kebutuhan organisasi dan masyarakat.
	Target
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penanggung Jawab
	Sekretaris

1.1.9 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
	Deskripsi
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil adalah kegiatan strategis untuk mengatur tata guna lahan perairan provinsi agar pemanfaatannya berjalan secara tertib, adil, dan berkelanjutan. Melalui instrument perencanaan zonasi dan perizinan PKKPR, kegiatan ini berfungsi untuk mencegah kerusakan ekosistem pesisir serta memitigasi konflik antar-pengguna ruang laut. Keberhasilan pengelolaan ini menjamin bahwa wilayah pesisir tetap menjadi sumber penghidupan jangka panjang bagi nelayan lokal sekaligus menjadi daya tarik investasi yang selaras dengan prinsip ekonomi biru dan kelestarian lingkungan.
	Target

	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir

1.1.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
	Deskripsi
	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil merupakan proses pelayanan perizinan yang sistematis untuk memastikan seluruh aktivitas pembangunan dan investasi di wilayah perairan provinsi berjalan sesuai dengan rencana tata ruang laut yang berlaku. Melalui tahapan verifikasi dokumen, peninjauan lapangan, dan sinkronisasi zonasi, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan nelayan lokal serta kelestarian lingkungan laut. Dengan terlaksananya kegiatan ini secara transparan, pemanfaatan sumber daya kelautan dapat dikelola dengan tertib, mencegah konflik kepentingan antar-sektor, dan mendukung perwujudan ekonomi biru di wilayah pesisir.
	Target
	Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir

1.1.11 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Deskripsi
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan strategis yang bertujuan untuk mentransformasi masyarakat pesisir menjadi komunitas yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara ekologis. Melalui kombinasi pelatihan keterampilan pengolahan produk, penguatan organisasi kelompok, serta

	penyediaan infrastruktur pendukung di wilayah terpencil, kegiatan ini berupaya memutus rantai kemiskinan dan ketergantungan. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan warga, tetapi juga dari terciptanya rasa kepemilikan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan laut sebagai sumber penghidupan jangka panjang mereka.
	Target
	1) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir

1.1.12 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
	Deskripsi
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil merupakan serangkaian kegiatan strategis yang mengintegrasikan pelayanan perizinan kapal, pengaturan alat tangkap ramah lingkungan, dan pemantauan data hasil tangkapan guna mewujudkan perikanan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara intensitas penangkapan dengan daya dukung sumber daya ikan di perairan provinsi, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nelayan kecil. Dengan pengelolaan yang efektif, diharapkan produktivitas sektor perikanan tangkap tetap terjaga, konflik antar-nelayan dapat diminimalisir, dan kelestarian sumber daya hayati laut tetap terjamin untuk generasi mendatang.
	Target
	1) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 2) Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur 3) Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur 4) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap

1.1.13 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dalam rangka pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	Deskripsi
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Darat Lintas Kabupaten/Kota adalah rangkaian aktivitas strategis untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di ekosistem sungai, danau, dan rawa yang berada dalam cakupan wilayah provinsi. Kegiatan ini meliputi pengaturan izin penangkapan, standarisasi alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya pemulihan stok ikan melalui program restocking. Dengan koordinasi lintas daerah yang kuat, kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sumber pangan protein hewani bagi masyarakat pedalaman, meminimalisir kerusakan habitat akibat praktik penangkapan ilegal, serta memastikan kesinambungan ekonomi bagi nelayan perairan darat secara adil dan berkelanjutan.
	Target
	1) Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 3) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap

1.1.14 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
	Deskripsi
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal 10-30 GT adalah rangkaian layanan publik yang mengintegrasikan verifikasi dokumen, inspeksi teknis lapangan, dan validasi alat tangkap guna memberikan legalitas bagi pelaku usaha perikanan skala menengah. Kegiatan ini berperan penting sebagai instrumen pengendalian sumber daya ikan, di mana setiap izin yang diterbitkan didasarkan

	pada daya dukung perairan provinsi agar terhindar dari penangkapan berlebih (overfishing). Melalui layanan yang tertib dan berbasis digital, kegiatan ini memberikan kepastian hukum bagi nelayan dan pengusaha, meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjamin kepatuhan terhadap standar perikanan berkelanjutan.
	Target
	1) Fasilitasi menyiapkan dokumen dasar kapal dan badan usaha 2) Fasilitasi Pengajuan Perizinan Berusaha (SIUP) 3) Fasilitasi Permohonan Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 4) Fasilitasi Pemeriksaan Fisik dan Cek Kelaikan
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap

1.1.15 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
	Deskripsi
	Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi merupakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian infrastruktur strategis kelautan yang berfungsi sebagai jembatan ekonomi antara laut dan darat. Kegiatan ini mencakup pembangunan fasilitas bongkar muat yang memadai, penyediaan sarana pendukung kualitas ikan seperti pabrik es, hingga layanan administrasi kesyahbandaran yang memastikan keselamatan pelayaran. Dengan tata kelola pelabuhan yang profesional, instansi dapat menjamin didaratkannya hasil tangkapan yang bermutu tinggi, meningkatkan efisiensi operasional nelayan, serta menjadikan pelabuhan sebagai pusat data perikanan yang akurat untuk mendukung kebijakan perikanan berkelanjutan di daerah.
	Target
	1) Pelabuhan Perikanan Bahaur 2) Pelabuhan Perikanan Batanjung 3) Pelabuhan Perikanan Ujung Pandaran 4) Pelabuhan Perikanan Sei Ijum 5) Pelabuhan Perikanan Bahaur 6) Pelabuhan Perikanan Selat Jeruju
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap

a. Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang

Indikator Kinerja Kegiatan	Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang
	Deskripsi
	<p>Pelabuhan Perikanan (PP) Kuala Pembuang merupakan pusat layanan perikanan strategis di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi bagi masyarakat pesisir di wilayah Seruyan Hilir. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, pelabuhan ini menyediakan layanan operasional yang komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas tambat labuh yang aman, area pendaratan ikan yang higienis, hingga akses bahan bakar bersubsidi melalui SPBUN khusus nelayan. Selain aspek teknis, pelabuhan ini juga menjadi pusat administrasi kesyahbandaran yang melayani penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta aktif melakukan pembinaan mengenai Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk menjamin mutu hasil tangkapan. Dengan didukung pengembangan infrastruktur terbaru seperti Dermaga Tahap III yang lebih modern, PP Kuala Pembuang berkomitmen menciptakan ekosistem perikanan yang legal, aman, dan memiliki daya saing tinggi demi kesejahteraan nelayan lokal.</p>
	Target
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan Operasional & Teknis 2) Layanan Pasca Panen & Pemasaran 3) Layanan Administrasi & Kesyahbandaran 4) Layanan Penunjang untuk mendukung komunitas nelayan di sekitar pelabuhan
	Penanggung Jawab
	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang

b. Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai

Indikator Kinerja Kegiatan	Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai
	Deskripsi
	<p>Pelabuhan Perikanan (PP) Kumai merupakan pusat layanan perikanan terpadu di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi tumpuan utama bagi distribusi hasil laut di wilayah tersebut. Pelabuhan ini menyediakan layanan jasa pelabuhan yang lengkap, mulai dari fasilitas tambat labuh dan pendaratan ikan yang representatif, hingga pemenuhan kebutuhan logistik seperti air bersih, es, dan BBM bersubsidi bagi nelayan. Selain mendukung operasional teknis, PP Kumai juga berperan penting dalam aspek legalitas melalui layanan kesyahbandaran, pengawasan mutu</p>

	melalui penerapan standar penanganan ikan yang baik, serta menjadi pusat penggerak ekonomi melalui aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
	Target
	1) Layanan Operasional & Teknis 2) Layanan Pasca Panen & Pemasaran 3) Layanan Administrasi & Kesyahbandaran 4) Layanan Penunjang untuk mendukung komunitas nelayan di sekitar pelabuhan
	Penanggung Jawab
	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kumai

1.1.16 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	Deskripsi
	Terlaksananya kegiatan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota merupakan bentuk pelayanan publik Pemerintah Provinsi untuk menjamin legalitas usaha perikanan yang memiliki cakupan wilayah luas. Proses ini mencakup verifikasi dokumen melalui sistem Online Single Submission (OSS), koordinasi tata ruang lintas daerah, hingga pemeriksaan teknis lapangan guna memastikan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Dengan terbitnya izin ini, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan investasi, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan serta pemantauan dampak lingkungan yang terintegrasi di tingkat provinsi.
	Target
	1) Pendataan Statistik Produksi Perikanan Budi Daya 2) Pendataan Sarana dan Prasarana
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

1.1.17 Pengelolaan pembudidayaan Ikan di Laut

Sasaran Kegiatan	Pengelolaan pembudidayaan Ikan di Laut
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

	Deskripsi
	<p>Terlaksananya kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut merupakan wujud integrasi antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem bahari. Kegiatan ini dimulai dengan penempatan lokasi usaha yang selaras dengan rencana zonasi wilayah pesisir untuk menghindari konflik kepentingan ruang, diikuti dengan penerapan teknologi Keramba Jaring Apung (KJA) yang ramah lingkungan. Selain itu, pengelolaan ini mencakup pendampingan teknis bagi pembudidaya dalam menerapkan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), pengawasan kualitas air secara berkala, serta pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut. Dengan pengelolaan yang terstruktur, budidaya laut tidak hanya mampu meningkatkan produksi perikanan nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan laut untuk generasi mendatang.</p>
	Target
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surveilans dan Pemantauan Penyakit Ikan 2) Pemantauan Kualitas Lingkungan Budidaya 3) Penerapan Biosekuriti dan Pencegahan 4) Pengawasan Obat Ikan dan Bahan Kimia 5) Penanggulangan Wabah Lintas Daerah
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

1.1.18 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
	Deskripsi
	<p>Terlaksananya kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di perairan darat merupakan upaya terpadu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya air tawar melalui perencanaan tata ruang yang berbasis daya dukung lingkungan. Kegiatan ini meliputi penyediaan infrastruktur irigasi yang baik, penerapan teknologi budidaya modern seperti bioflok, serta penguatan kapasitas pembudidaya dalam manajemen pakan dan kesehatan ikan. Dengan diterapkannya standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan penguatan lembaga kelompok pembudidaya, program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan, dan menjaga kelestarian ekosistem perairan darat dari pencemaran limbah organik.</p>
	Target

	1) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

a. Layanan UPT. Perikanan Budidaya Air Payau

Indikator Kinerja Kegiatan	Layanan UPT. Perikanan Budidaya Air Payau
	Deskripsi
	UPT Perikanan Budidaya Air Payau berfungsi sebagai pusat keunggulan teknis yang mendukung keberlanjutan sektor pertambakan melalui penyediaan benih unggul, seperti nener bandeng dan PL udang yang berkualitas. Selain distribusi benih, layanan utama UPT ini mencakup pengujian laboratorium untuk kualitas air dan deteksi penyakit guna memitigasi risiko kegagalan budidaya secara dini. Melalui program pendampingan sertifikasi CBIB dan penyediaan kawasan percontohan (demplot), UPT ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas petambak lokal, tetapi juga memastikan bahwa praktik budidaya yang dilakukan memenuhi standar keamanan pangan dan keramahan lingkungan yang diakui secara nasional maupun internasional.
	Target
	1) Bimbingan Teknis & Penyuluhan 2) Penyediaan Benih Berkualitas 3) Pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau 4) Pembinaan Kelompok Pembudidaya (Pokdakan) 5) Pengembangan Pasca-Panen & Pemasaran
	Penanggung Jawab
	Kepala UPT. Perikanan Budidaya Air Payau

1.1.19 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
	Deskripsi
	Terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil laut merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam menegakkan

	hukum di laut serta melindungi hak-hak nelayan lokal. Kegiatan ini meliputi patroli rutin untuk memverifikasi legalitas dokumen kapal, pemeriksaan alat tangkap guna mencegah destructive fishing, hingga pengawasan pemanfaatan ruang laut agar sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir. Melalui koordinasi antara aparat pengawas perikanan, kepolisian perairan, dan peran aktif Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola laut yang tertib, mencegah konflik antar-nelayan, dan memastikan ekosistem laut tetap produktif untuk generasi mendatang.
	Target
	1) Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi 2) Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi 3) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan

1.1.20 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Sasaran Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
	Deskripsi
	Terlaksananya kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan skala menengah dan besar merupakan upaya strategis untuk menjamin produk perikanan Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global. Kegiatan ini mengintegrasikan pengawasan ketat terhadap implementasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan sistem HACCP guna memitigasi risiko kontaminasi pada produk. Melalui pendampingan teknis pada aspek Good Manufacturing Practices (GMP) dan prosedur sanitasi yang standar, pemerintah memastikan bahwa setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) mampu menghasilkan produk yang aman, sehat, dan memenuhi kriteria ekspor internasional. Hasil akhirnya bukan hanya perlindungan bagi konsumen, tetapi juga terciptanya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas komoditas perikanan nasional.
	Target
	1) Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha

	dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 2) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

1.1.21 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sasaran Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dalam rangka Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	Deskripsi
	Terlaksananya kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi merupakan upaya strategis untuk menciptakan konektivitas ekonomi antara wilayah penghasil dan wilayah industri. Kegiatan ini mencakup koordinasi logistik berbasis rantai dingin guna menjaga kesegaran produk selama distribusi, pemetaan data pasokan secara real-time, serta fasilitasi kemitraan usaha (business matching) antara nelayan di sentra produksi dengan unit pengolahan ikan di pusat kota. Dengan terjaminnya aliran bahan baku yang lancar, legal, dan berkualitas, program ini mampu menjaga stabilitas harga ikan, meminimalisir pemborosan hasil tangkapan (fish loss), serta memastikan industri pengolahan ikan provinsi terus beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan.
	Target
	1) Dukungan Bahan Baku Industri Pengolahan 2) Penguatan Logistik dan Distribusi
	Penanggung Jawab
	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

1.1.22 Peningkatan Pelayanan BLUD

Sasaran Kegiatan	Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Layanan BLUD
	Deskripsi

	<p>Terlaksananya kegiatan layanan BLUD udang vaname mencerminkan sinergi antara fungsi edukasi pemerintah dan kemandirian ekonomi. Melalui skema ini, unit layanan mampu mengelola operasional budidaya secara intensif dan pemasaran hasil panen secara profesional tanpa terkendala kaku pembiayaan daerah. Fleksibilitas BLUD memungkinkan unit ini memberikan layanan cepat berupa uji laboratorium penyakit udang dan penyediaan sarana produksi berkualitas bagi petambak lokal. Dengan demikian, layanan BLUD udang vaname berperan sebagai penggerak utama modernisasi pertambakan, menjamin ketersediaan stok pangan protein, serta menjadi sumber pendapatan daerah yang dikelola secara transparan dan akuntabel.</p>
	Target
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan jasa produksi budidaya Udang Vanname 2) Layanan jasa produksi pabrik es 3) Layanan jasa perbaikan perlatan mesian dan instalasi listrik 4) Layanan jasa pengujian kualitas air dan mikrobiologi 5) Layanan jasa penyediaan armada angkut mobil sistim pendingin 6) Layanan jasa penyediaan alat berat excavator 7) Layanan jasa penyediaan peralatan produksi 8) Layanan jasa pelatihan teknis dan pengembangan sumber daya manusia 9) Layanan jasa teknis pendampingan dan mentoring pelaku usaha budidaya
	Penanggung Jawab
	Kepala BLUD UPT. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai

Sumber : diolah

BAB III PENUTUP

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen teknis yang sangat vital dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan definisi, tetapi sebagai instrumen kendali untuk memastikan setiap gerak organisasi selaras dengan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Bumi Tambun Bungai.

Beberapa hal utama yang menjadi simpulan dan harapan dari penyusunan manual ini adalah:

1. **Standarisasi Pengukuran:** Dengan adanya manual ini, seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pemahaman yang seragam dalam menghitung, mengelola, dan melaporkan capaian kinerja, mulai dari indikator kebutuhan benih hingga transparansi informasi publik melalui PPID.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Manual ini menjadi bukti komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyajikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder, guna mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, serta pengolah hasil perikanan di Kalimantan Tengah.
3. **Dasar Pengambilan Keputusan:** Data yang dihasilkan dari pengukuran indikator-indikator dalam manual ini akan menjadi rujukan utama bagi pimpinan dalam mengevaluasi efektivitas program dan merumuskan kebijakan strategis pada tahun-tahun mendatang.
4. **Komitmen Perbaikan Berkelanjutan:** Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, regulasi daerah, maupun perkembangan situasi lapangan di sektor kelautan dan perikanan.

Keberhasilan pencapaian target-target yang tertuang dalam manual ini sangat bergantung pada sinergi, dedikasi, dan koordinasi yang baik antar bidang serta dukungan dari Dinas Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota. Semoga Manual IKU 2025 ini dapat diimplementasikan dengan optimal demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang Makin Berkah melalui sektor kelautan dan perikanan yang tangguh dan berkelanjutan.